

INNOVATIVE GOVERNANCE: STUDI PENGELOLAAN DTKS MELALUI SIKS-NG DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN BOGOR

INNOVATIVE GOVERNANCE: A STUDY ON DTKS MANAGEMENT THROUGH SIKS-NG IN FULFILLING SOCIAL WELFARE IN BOGOR

Ana Mulyana¹, Muhammad Husein Maruapey², Rita Rahmawati³

¹Administrasi Publik, Universitas Djuanda, mulyana.my48@gmail.com

²Administrasi Publik, Universitas Djuanda, muhammadhusein1@unida.ac.id

³Administrasi Publik, Universitas Djuanda, rita.rahmawati@unida.ac.id

ABSTRACT

This study aims to explore innovations in the governance of integrated social welfare data management through the SIKS-NG application and its impact on the fulfillment of social welfare services in Bogor Regency. SIKS-NG is a digital platform that integrates social welfare data from various sources to support the planning and implementation of more effective and efficient social programs. The methodology of this research involves qualitative analysis using secondary data from, interviews with stakeholders, observations, documentation, literacy studies and surveys of beneficiaries. The results of the study show that innovative governance in the management of DTKS through the SIKS-NG application in the context of fulfilling social welfare in Bogor district has been running well. The management of DTKS through SIKS-NG is based on Rogers' innovation attribute that there are innovation characteristics in the system, and the SIKS-NG application provides guidance.

Key words: SIKS-NG, DTKS, Attributes of Innovation, Governance, Social welfare.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi inovasi dalam tata kelola pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial melalui aplikasi SIKS-NG dan dampaknya terhadap pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bogor. SIKS-NG merupakan platform digital yang mengintegrasikan data kesejahteraan sosial dari berbagai sumber untuk mendukung perencanaan dan implementasi program sosial yang lebih efektif dan efisien. Metodologi penelitian ini melibatkan analisis kualitatif dengan menggunakan data sekunder dari, wawancara dengan pemangku kepentingan, Observasi, dokumentasi, studi literasi serta survei terhadap penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa innovative governance dalam pengelolaan DTKS melalui aplikasi SIKS-NG dalam rangka pemenuhan kesejahteraan social dikabupaten bogor telah berjalan dengan baik. Pengelolaan DTKS melalui SIKS-NG berdasarkan atribut inovasi Rogers bahwa terdapat karakteristik inovasi dalam sistem tersebut, dan aplikasi SIKS-NG memberikan keuntungan dan kemudahan dalam mengelola data terpadu kesejahteraan sosial, aplikasi ini telah berkembang lebih baik dari sitem sebelumnya dari akurasi dan integritasi data, mempercepat proses identifikasi dan verifikasi penerima manfaat, serta memperbaiki koordinasi antara lembaga pemerintah dan pihak terkait. Penelitian ini menyarankan perbaikan dalam aspek pelatihan teknis bagi pengguna, serta pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penggunaan SIKS-NG.

Kata kunci: SIKS-NG, DTKS, Kesejahteraan sosial, Inovasi Governance.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan aspek fundamental dalam pembangunan

masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. Dalam konteks

pemerintahan daerah, pengelolaan program kesejahteraan sosial yang efektif sangat bergantung pada ketersediaan dan akurasi data yang terintegrasi. Kabupaten Bogor, sebagai salah satu daerah dengan populasi besar dan beragam, menghadapi tantangan signifikan dalam hal pengelolaan data kesejahteraan sosial. Sistem informasi yang ada sering kali terfragmentasi, mengakibatkan kurangnya koordinasi dan pemanfaatan data yang tidak optimal dalam perencanaan dan implementasi program sosial.

Keterbatasan sistem informasi yang tidak terintegrasi dan data yang terfragmentasi menyebabkan berbagai masalah dalam pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial. Proses identifikasi dan verifikasi penerima manfaat sering kali lambat dan kurang akurat, yang berdampak pada efektivitas program sosial. Selain itu, keterbatasan dalam data juga mempersulit perencanaan yang berbasis bukti dan penilaian dampak program. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dalam tata kelola data yang mampu mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan kesejahteraan sosial.

Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya integrasi data antara berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan dalam program kesejahteraan sosial. Data yang tersebar di berbagai sistem dan tidak saling terhubung mengakibatkan proses identifikasi dan verifikasi penerima manfaat menjadi lambat dan tidak akurat. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat dan menghambat efektivitas program sosial yang seharusnya mampu menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Untuk menunjang integrasi dan pengelolaan data kemiskinan yang handal, pemerintah melalui Kementerian sosial berupaya memanfaatkan inovasi di bidang pendataan maka pada tahun 2017 dibangunlah suatu sistem Informasi

terpadu yang diberi nama Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG). Selain mengelola data rumah tangga miskin dan tidak mampu, SIKS-NG juga mengelola data Program Perlindungan Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako (Program Beras Sejahtera/Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), serta data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Pusdatin Kemensos, 2020).

Aplikasi SIKS-NG merupakan sistem pengelolaan data yang dikembangkan oleh Pusdatin Kesos Kemensos. Dibangun mulai pertengahan tahun 2017, SIKS-NG mulai diperkenalkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial melalui bimbingan teknis (bimtek) secara nasional di Jakarta pada bulan Oktober 2017. Aplikasi ini dirilis dalam 2 platform berbeda yaitu SIKS-NG Offline versi. 1.0 (berbasis desktop) dan SIKS-NG Online (berbasis Web) beserta dengan logonya.

SIKS-NG Offline merupakan aplikasi pemutakhiran data yang tidak memerlukan koneksi Internet secara terus-menerus. Aplikasi ini dapat digunakan dan di distribusikan dari level kabupaten sampai ke level desa (yang telah ditetapkan oleh Pemda Kabupaten/Kota) lengkap dengan data rumah tangga pada level wilayah yang telah ditetapkan tersebut. SIKS-NG Offline merupakan aplikasi pengelolaan data yang memudahkan petugas lapangan mengirimkan data hasil kunjungan lapangan ke Pemda Kabupaten/Kota melalui SIKS-NG Online. SIKS-NG Online adalah aplikasi berbasis Web yang hanya bisa diakses oleh petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota (Supervisor dan Operator SIKS-NG) yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Fungsi aplikasi SIKS-NG Online adalah memudahkan pemerintah Kabupaten atau Kota dalam pemeriksaan hasil pemutakhiran data petugas lapangan dan

mengesahkan usulan pemutakhiran data tersebut untuk dikirimkan ke Kementerian Sosial R.I. (Pusdatin Kemensos, 2020).

Hadirnya sistem ini tentu disambut baik oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Bogor. Sistem ini Sebagai bentuk penerapan inovasi governance dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial melalui aplikasi SIKS-NG.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Inovasi Governance pada pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan sosial melalui penerapan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) dalam meningkatkan pengelolaan data kesejahteraan sosial di Kabupaten Bogor.

SIKS-NG dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber secara lebih efektif, yang diharapkan dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan koordinasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan meneliti penerapan sistem ini, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak inovasi ini terhadap pengelolaan data dan implementasi program sosial di tingkat kabupaten. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Innovative Governance: Studi Pengelolaan DTKS Melalui SIKS-NG Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Bogor”.

METODE PENELITIAN

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Chandler dan Plano (1988)

Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah masalah publik atau pemerintah (Abdal, 2015).

Menuru Thomas R. Dye (1981): Kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan

oleh pemerintah (“is whatever government choose to do or not to do”). Pokok kajian dari hal ini adalah negara (Abdal, 2015).

Menurut David Easton (1969)

Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat (Abdal, 2015).

Selain pengertian tersebut, Nugroho (2014) dalam Huraerah (2019). Mengatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan politik yang dibuat oleh Lembaga publik. Lembaga publik merupakan Lembaga yang mana pendanaannya didanai oleh uang yang bersumber dari publik atau masyarakat yaitu uang yang bersumber dari publik berupa pajak, retribusi, atau pungutan-pungutan lain yang ditetapkan secara formal.

2. Fungsi Dan Tujuan Kebijakan Publik

Berdasarkan uraian Clarke E. Cochran, et al., dalam Suaib et al. (2022), alasan mempelajari fungsi dan tujuan studi kebijakan publik karena beberapa hal.

Pertama, alasan teoritis (theoretical). Ilmuan politik berusaha memahami dan menjelaskan dunia politik, yakni mereka berusaha mengembangkan dan menguji generalisasi perilaku politik individu dan institusi

Kedua, alasan praktis (practical). Para akademis yang mempelajari kebijakan publik ingin menerapkan pengetahuan tentang ilmu kebijakan publik untuk memecahkan masalah praktis.

Ketiga, alasan politik (political). Diskursus dan kontroversi atas kebijakan publik bukan lah hal baru tetapi saat ini cakupan masalah yang menimbulkan ketidaksepakatan cenderung jauh lebih besar daripada dimasa lalu. Hal ini Sebagian besar disebabkan oleh penyebaran Pendidikan, yang sangat terkait dengan keterlibatan politik dan mobilisasi penduduk melalui media massa.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Hal yang paling esensial dalam kebijakan negara adalah melaksanakan kebijakan negara. Jika suatu kebijakan tersebut telah diputuskan, maka kebijakan tersebut tidak akan berhasil dan terwujud jika tidak dilaksanakan. Usaha untuk melaksanakan kebijakan tentunya membutuhkan keahlian dan ketrampilan dalam menguasai persoalan yang hendak dikerjakan, sehingga dalam hal ini kedudukan birokrasi menjadi strategis. Birokrasi yang berkewajiban melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga birokrat dituntut memiliki ketrampilan dan keahlian yang tinggi (Subianto, 2020).

Menurut (P. Sabatier & Mazmanian, 1980) yang di kutif Subianto (2020) Implementasi Kebijakan adalah:

“... Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi sesudah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu menyangkut usaha usaha mengadministrasikan maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat maupun peristiwa-peristiwa”.

Senada dengan pendapat diatas, Marilee S. Grindle (1980) dalam Subianto (2020) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan negara sesungguhnya bukanlah sekedar berangkat dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin untuk

saluran birokrasi, namun juga terkait dengan masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh ‘apa’ dari suatu kebijakan.

B. Innovative Governance

Untuk memahami innovative governance, alangka baiknya kita menilik asal kata inovasi tersebut. Kata inovasi berasal dari innovative (Bahasa Inggris) yang artinya berubah menjadi sesuatu yang baru Irwan (2013) dalam (Rahman, Tarigan 2020).

Inovasi sering dikaitkan dengan sesuatu yang baru, asli dalam tindakan dan ide-ide baru dalam sebuah urusan. Pada sisi lain

suatu kebijakan, program, atau aksi, dapat disebut sebagai inovasi bukan hanya berbicara tentang ide-ide baru saja melainkan adanya praktik baru dalam pelaksanaannya J. Bessant (2003) dalam (Rahman, Tarigan, 2020).

Inovasi menurut Osborne dan Brown, “Innovation is the introduction of new element into a public service in the form of new knowledge, new organization, and/or new management or processual skills (Rahman, Tarigan, 2020).

Sedangkan menurut Egger inovasi adalah: “Innovation as a process, one that reflects an organization’s orientations. Organization focused internally will be mired in the past. To create a culture with a sustained capacity to innovate require an external orientations, a willingness to draw on all source of innovative ideas-employees, citizens, and other public or private organization”.

Menurutnya Inovasi sebagai sebuah proses, yang mencerminkan orientasi organisasi. Organisasi yang berfokus secara internal akan terperosok di masa lalu. Untuk menciptakan budaya dengan kapasitas yang berkelanjutan untuk berinovasi memerlukan orientasi eksternal, kemauan untuk memanfaatkan semua sumber ide inovatif – karyawan, warga negara, dan organisasi publik atau swasta lainnya (Rahman, Tarigan, 2020).

Sedangkan Menurut Rogers inovasi yaitu, “Innovation is an idea, practice or object that is perceived as new individual or other unit of adofter”. bahwa berdasarkan pemikirannya tentang inovasi, Rogers menyimpulkan empat elemen pokok dalam proses difusi inovasi. Pertama inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu dan ke empat sistem social.

Dari beberapa para ahli di atas, dapat diketahui bahwa tidak terjadi perbedaan yang mendasar tentang definisi inovasi antara satu dengan yang lain. Semua pendapat di atas menyatakan bahwa inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara dan barang-barang buatan manusia yang diamati atau

dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau kelompok orang. Sesuatu yang baru itu dapat berupa hasil diskoveri atau invensi yang dimanfaatkan dalam mencapai tujuan tertentu dan untuk memecahkan masalah tertentu.

1. Dimensi Inovasi

Kemampuan inovasi suatu organisasi atau lembaga dalam sektor publik dapat diukur dari sejumlah faktor yang disebut sebagai dimensi inovasi, adapun dimensi inovasi yang dikembangkan dalam sektor publik menurut Halvorsen yang dikutip Suwarno (2008) sebagai berikut:

- Inovasi Konseptual

Inovasi Konseptual adalah memperkenalkan ide baru atau strategi baru yang rasional atau hasil dari inovasi konseptual ialah kemunculan paradigma, ide, gagasan, pemikiran, dan terobosan baru.

- Inovasi Delivery

Inovasi delivery adalah termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam menyelesaikan masalah, memberikan layanan atau berinteraksi dengan klien untuk tujuan pemberian layanan khusus. Hal yang menjadi tolak ukur dalam inovasi delivery ini adalah cara atau metode baru di dalam penyampaian informasi mengenai penyelenggaraan sebuah inovasi kepada pelanggan agar sistem layanan berjalan secara efektif.

2. Prinsip Inovasi

Inovasi tidak akan bisa berkembang dalam kondisi keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya. Menurut Rogers yang dikutip oleh Suwarno (2008), menjelaskan prinsip-prinsip inovasi, sebagai berikut:

1. Relative Advantage atau Keuntungan Relatif.

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakan dengan yang lain.

2. Compatibility atau Kesesuaian.

Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.

3. Complexity atau kerumitan.

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

4. Triability atau kemungkinan dicoba.

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase uji publik, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

5. Observability atau Kemudahan Diamati

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Berdasarkan prinsip-prinsip ini atau yang disebut roger sebagai atribut inovasi seperti itu, maka sebuah inovasi merupakan cara baru menggantikan cara lama dalam mengerjakan atau memproduksi sesuatu. namun demikian, inovasi mempunyai dimensi geografis yang menempatkannya baru pada satu tempat, namun boleh jadi merupakan sesuatu yang lama dan biasa terjadi di tempat lain.

C. Konsep Kesejahteraan Sosial

1. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang

memiliki arti aman, sentosa, makmur dan selamat (Poerwadarminto, 1999). Dalam konsepnya sejahtera ini merujuk pada keadaan yang baik, kondisi di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya dalam keadaan sehat, makmur dan damai. Kesejahteraan juga bisa diartikan dengan keadaan seseorang yang terbebas dari jerat kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang baik dan nyaman secara lahir dan batin (Sari dan Sanjani, 2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menjelaskan kesejahteraan sosial adalah kondisi telah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial dari warga negaranya sehingga mereka mampu hidup layak, mengembangkan diri dan melakukan fungsi sosialnya sebagai manusia. Sementara itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaknai sebagai upaya teratur, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya di mana meliputi jaminan sosial, pemberdayaan dan perlindungan sosial (Sari dan Sanjani, 2023).

Kesejahteraan sosial menurut Huraerah (2019), yaitu: "Kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan atau sekumpulan kegiatan yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang bermasalah".

Soehartono (2009) menyatakan bahwa Pekerjaan Sosial yaitu aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. Fokus pekerjaan sosial adalah membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial.

Menurut Edi Suharto (2006) kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas

kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan social merupakan upaya yang dilakukan untuk merancang sebuah proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat baik dilakukan oleh preorangan, organisasi atau intansi baik swasta atau pemerintah sehingga masyarakat mampu memenuhi atau melakukan keberpungsiannya sebagai manusia.

2. Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial dapat dilihat sebagai kinerja atau capaian, yaitu evaluasi terhadap hasil penerapan produk kebijakan sosial. Kebijakan sosial dalam pengertian ini menyangkut kegiatan analisis untuk melihat dampak penerapan suatu peraturan perundang undangan (Alam; 2012) (dalam Abidin, 2015).

Sebagaimana yang dikemukakan sumargo (2000) Intervensi pemerintah diperlukan untuk mencapai nilai-nilai pembangunan (development values) yang menjurus kepada keadilan sosial (social fairness and justice). (Abidin, 2015).

Capaian kesejahteraan, seperti halnya di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan dan kinerja kebijakan sosial (social policy) yang dikembangkan oleh negara. Kebijakan sosial, menurut Midgley (2000) dalam huraerah (2019), adalah instrumen kebijakan yang secara khusus dirancang dan diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Selaras dengan hal ini, menurut Lindenthal (Tribowo & Subono, 2009:5), kebijakan sosial pada dasarnya merupakan instrument kebijakan yang digunakan untuk memastikan bahwa warga negara mendapatkan akses terhadap pelayanan sosial dasar, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, perlindungan sosial, dan berbagai tunjangan sosial yang berbasis pajak (Huraerah, 2019).

Lindenthal (2004) dalam Huraerah (2019) menambahkan bahwa kebijakan sosial secara luas melayani empat tujuan utama, yaitu:

- a. Pengurangan kemiskinan;
- b. Peningkatan standa rhidup;
- c. Pengurangan kerentanan sosial (social vulnerability); serta
- d. Penciptaan kesempatan kerja.

Setelah menelaah definisi kebijakan sosial dan mengidentifikasi wilayah kebijakan sosial, Gil (1973) dalam Huraerah (2019) lebih lanjut menegaskan bahwa kebijakan sosial merupakan prinsip-prinsip atau arah-arrah tindakan yang dirancang untuk mempengaruhi:

- a. keseluruhan kualitas kehidupan dalam masyarakat,
- b. keadaan kehidupan individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat itu, dan
- c. hakikat hubungan dalam masyarakat antara individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan.

3. Fungsi Kebijakan Sosial

Berkaitan dengan fungsi kebijakan sosial, dapat dijelaskan bahwa secara sederhana berdasarkan sasarannya, fungsi kebijakan social dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

- a. fungsi berkaitan dengan individu, misalnya kegiatan kemanusiaan secara umum, perlindungan pada golongan yang rentan, dan pengembangan kapasitas individu.
- b. Fungsi berkaitan dengan masyarakat secara keseluruhan, misalnya usaha untuk menciptakan struktur sosial baru, melaksanakan kontrol sosial, atau meningkatkan pembangunan ekonomi (Spicker, 1995) (dalam Huraerah, 2019).

Sementara, berdasarkan kondisi yang diinginkan, Spicker (1995) lebih lanjut menjelaskan bahwa fungsi kebijakan dapat dibedakan menjadi fungsi untuk mempertahankan status quo, untuk mengubah keadaan orang, dan untuk

mengurangi kesejahteraan beberapa orang tertentu (dalam Huraerah, 2019).

4. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

PPKS merupakan sebutan yang sebelumnya adalah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal tersebut dikarenakan bahwa istilah PMKS dianggap tidak relevan. Misalnya, penyandang disabilitas sejak lahir harus diberikan layanan kesejahteraan sosial, bukan dikategorikan sebagai masalah sosial yang ada sejak lahir (Arishanty, 2022).

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat

melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5, 2019). Berikut jenis-jenis PPKS

1. Anak Balita Telantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan
7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Telantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

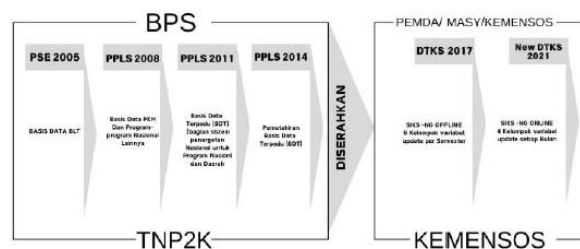
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
 18. Korban Trafficking
 19. Korban Tindak Kekerasan
 20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
 21. Korban Bencana Alam
 22. Korban Bencana Sosial
 23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
 24. Fakir Miskin
 25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
 26. Komunitas Adat Terpencil
- D. DTKS dan SIKS-NG

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Data terpadu kesejahteraan sosial merupakan sistem data berbentuk elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi status kesejahteraan sosial di Indonesia. Berdasarkan peraturan Menteri sosial nomor 3 tahun 2021 menjelaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial (Permensos RI, 2021).

Data terpadu kesejahteraan sosial berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, dan data penerima bantuan sosial. Yang dapat digunakan oleh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Dalam penggunaannya harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam berita acara serah terima, tidak meyebarkan data kepada pihak lain dan menjaga dan bertanggung jawab terhadap keamanan data dan menghindari penggunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan. DTKS sendiri digunakan dalam menetapkan sasaran program-program perlindungan sosial (PERMENSOS Nomor 3 Tahun 2021).

Berikut dapat digambarkan perkembangan pengelolaan DTKS.



Gambar 1. Pengelolaan DTKS

2. Sistem Informasi Kesejahteraan Nex-Generation

Pemerintah terus berinovasi dan berlomba-lomba untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dengan cara yang lebih modern dan efektif (Kurniasih & Wismaningtyas, 2020). Tak terkecuali dengan Kementerian Sosial yang terus berupaya untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dengan sistem digital yaitu aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- Next Generation (SIKS-NG) (Gaghauna, Safar dan Wahab, 2022).

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57/HUK/2017, tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia memperoleh mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data setiap tahun sekali. Verifikasi dan validasi tersebut dilakukan berdasarkan by name by address, yang ada di SIKS-NG menjadi acuan pada pelaksanaan program penanganan fakir miskin.

Dalam peraturan menteri sosial nomor 3 tahun 2021 disebutkan Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang

mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pendataan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dilakukan melalui basis Data terpadu kesejahteraan sosial melalui aplikasi online yang disebut

dengan SIKS-NG. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (permensos nomor 3 tahun 2021).

Menurut Parson bahwa penelitian adalah pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan (Alamsyahbana, et al., 2023).

Suatu penelitian harus bersifat ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan diantaranya: Rasional, Empiris dan sistematis.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (R. Semiawan, 2010). Kecenderungan untuk menggunakan metode penelitian ini karena dianggap sangat relevan dengan materi penulisan Tesis.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini menyangkut sumber-sumber penyedia informasi yang dapat mendukung informasi tentang hal-hal yang menjadi pusat perhatian peneliti. Yang dimaksud dengan Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data Premier

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan

peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data ke peneliti (Sugiyono, 2016).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti biro pusat statistik, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain (Sandu siyoto dan M Ali Sodik, 2015). Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian arsip-arsip atau modul serta buku-buku yang berkaitan dengan DTKS dan SISK-NG.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data terkait permasalahan penelitian yang diambilnya. Sugiyono (2016). menjelaskan teknik pengumpulan data sebagai langkah yang paling strategis dalam penelitian. Sebab tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data.

Pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik antara lain :

1. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data atau informasi melalui Tanya jawab. Metode ini membutuhkan komunikasi langsung antara peneliti dengan sumber data (Sugiyono, 2016).

2. Observasi

Obersevasi yaitu melakukan peninjaun secara langsung ke daerah atau lokasi penelitian untuk melihat kejadian sebenarnya secara gambaran umum(Sugiyono, 2016).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adlah metode dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah dan dokumen-dokumen lainnya. Dokumentasi terbagi menjadi dua

yaitu dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) adalah basis data yang mengintegrasikan informasi mengenai kesejahteraan sosial masyarakat untuk memfasilitasi penyaluran bantuan dan program-program sosial. Sementara SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation) adalah sistem informasi yang dirancang untuk mengelola dan memperbarui data DTKS dengan teknologi modern (Kemensos RI, 2023).

Di Kabupaten Bogor, pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menghadapi tantangan signifikan terkait dengan keakuratan dan pembaruan data kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, Kabupaten Bogor telah mengadopsi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG). Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan memperbaharui data secara efisien, serta mendukung inovasi dalam tata kelola pemerintahan.

Implementasi SIKS-NG di Kabupaten Bogor telah meningkatkan kinerja pengelolaan DTKS melalui otomatisasi dan pemrosesan data secara real-time. Hal ini mengurangi ketergantungan pada sistem manual yang seringkali rentan terhadap kesalahan. Dengan sistem yang lebih terotomatisasi, proses pembaruan dan verifikasi data menjadi lebih cepat dan akurat, memastikan bahwa informasi yang digunakan untuk kebijakan dan alokasi bantuan adalah terkini dan relevan.

Dengan penerapan SIKS-NG, Kabupaten Bogor telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan DTK melalui penggunaan teknologi informasi yang inovatif. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data, tetapi juga mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat, walaupun demikian kekurangan dalam

sistem ini masih ada dan masih memerlukan perbaikan sistem secara berkala.

Dalam menganalisis Penerapan Inovasi pada DTK melalui Aplikasi SIKS-NG, peneliti menggunakan teori Atribut Inovasi dari M Rogers Everretas (2003). Untuk lebih jelas dan terperinci akan diuraikan melalui atribut inovasi yang digunakan untuk menganalisis Innovative Governance pada pengelolaan DTKS melalui aplikasi SIKS-NG sebagai berikut:

1. Relative Advantage atau keuntungan relative

Keunggulan relatif mengacu pada sejauh mana inovasi dianggap lebih baik daripada solusi yang ada sebelumnya. Dalam hal ini, SIKS-NG menawarkan keunggulan relatif yang signifikan dibandingkan dengan sistem pengelolaan data kesejahteraan sosial yang sebelumnya. Dengan integrasi data yang lebih baik, sistem ini meningkatkan efisiensi, mengurangi duplikasi data, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti. Berdasarkan survei dan wawancara, sebagian besar pengguna melaporkan bahwa SIKS-NG mempermudah akses data dan mempercepat proses pelayanan kesejahteraan Sosial.

2. Compability atau kesesuaian

Kompatibilitas adalah sejauh mana inovasi sesuai dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan pengguna. SIKS-NG telah dirancang untuk kompatibel dengan sistem dan prosedur yang ada di Kabupaten Bogor. Namun, tantangan muncul terkait dengan integrasi sistem lama dan adaptasi terhadap teknologi baru. Upaya seperti pelatihan dan penyesuaian sistem menunjukkan bahwa meskipun ada kurva pembelajaran, tingkat kompatibilitasnya meningkat seiring waktu.

3. Complexity atau kerumitan

Kompleksitas merujuk pada sejauh mana inovasi sulit untuk dipahami dan digunakan. SIKS-NG memiliki antarmuka yang relatif kompleks bagi pengguna yang

tidak terbiasa dengan teknologi. Meskipun sistem ini menawarkan banyak fitur canggih, proses pelatihan dan dukungan teknis sangat penting untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan penggunaan sistem. Masukan dari pengguna atau operator SIKS-NG menunjukkan bahwa pelatihan yang efektif dan dukungan teknis dapat mengurangi rasa kompleksitas yang dirasakan.

4. Observability atau kemudahan diamati

Kemudahan observasi mengacu pada sejauh mana hasil dari inovasi mudah dilihat dan dievaluasi oleh orang lain. Hasil dari SIKS-NG, seperti peningkatan efisiensi dalam pengelolaan data dan kecepatan dalam layanan kesejahteraan sosial, cukup terlihat oleh semua

stakeholder. Dokumentasi dan laporan yang dihasilkan oleh sistem memudahkan pihak-pihak terkait untuk melihat manfaat langsung dari inovasi ini.

5. Triability atau kemungkinan dicoba

Trialabilitas adalah sejauh mana inovasi dapat diuji coba dalam skala kecil sebelum adopsi penuh. Implementasi SIKS-NG di Kabupaten Bogor dilakukan secara bertahap dengan uji coba di beberapa area sebelum penerapan luas. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi awal terhadap sistem dan perbaikan berdasarkan umpan balik, sehingga meningkatkan kemungkinan penerimaan yang lebih luas.

Berdasarkan teori Atribut inovasi tersebut di atas dapat diketahui hasil penelitian Innovative Governance pada pengelolaan DTKS melalui aplikasi SIKS-NG sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan 5 atribut inovasi yang diungkapkan oleh Rogers dengan adanya Sistem SIKS-NG dalam pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dapat memberikan keuntungan bagi stakeholder khusus bagi pengguna aplikasi dan masyarakat sebagai penerima manfaat, serta memiliki kesesuaian dengan sistem pendataan sebelumnya.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa innovative governance dalam pengelolaan DTKS melalui aplikasi SIKS-NG dalam rangka pemenuhan kesejahteraan social di kabupaten bogor telah berjalan dengan baik. Pengelolaan DTKS melalui SIKS-NG berdasarkan atribut inovasi Rogers bahwa terdapat karakteristik inovasi dalam sistem tersebut, dan aplikasi SIKS-NG memberikan keuntungan dan kemudahan dalam mengelola data terpadu kesejahteraan sosial, aplikasi ini telah berkembang lebih baik dari sistem sebelumnya dari segi integrasi data dan keakuratan data.

SIKS-NG mengintegrasikan berbagai data terkait kesejahteraan sosial untuk memberikan gambaran yang lebih akurat dan mendetail mengenai penerima manfaat, kebutuhan, dan efektivitas program sosial. Namun selain beberapa manfaat tersebut, sistem ini juga tentu harus selalu melakukan perbaikan agar sistem ini berjalan lebih maksimal untuk menopang kinerja pemerintah dan tentu dalam upaya melayani program kesejahteraan sosial.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak pemerintah

1. Pemerintah Kabupaten Bogor Pastikan bahwa infrastruktur seperti jaringan internet dan perangkat keras sudah memadai untuk mendukung penerapan SIKS-NG. Investasikan dalam peralatan dan teknologi terbaru jika diperlukan.
2. Dinas Sosial Selenggarakan pelatihan yang komprehensif untuk pegawai dan pengguna sistem agar mereka dapat menggunakan SIKS-NG secara efektif. Pastikan pelatihan mencakup aspek teknis dan manajerial guna peningkatan SDM.
3. Pemerintah Kecamatan Koordinasikan dengan pemerintah desa/kelurahan untuk memastikan integrasi data dan proses pendataan yang konsisten. Ajak

masyarakat berpartisipasi dalam proses pendataan dan berikan informasi tentang bagaimana mereka dapat memanfaatkan sistem.

4. Pemerintah Desa Lakukan pemantauan rutin terhadap penggunaan sistem untuk memastikan data yang dimasukkan akurat dan proses berjalan lancar. Evaluasi hasil dan efektivitas sistem secara berkala, serta gunakan umpan balik dari masyarakat untuk melakukan perbaikan. Lakukan kampanye sosialisasi di tingkat desa/kelurahan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat terkait pendataan DTKS.

5. Operator atau Pengguna SIKS-NG terus tingkatkan pemahaman tentang pembaruan sistem pendataan SIKS-NG, berikan pemahaman kepada masyarakat terkait prosedur pendataan dan pengajuan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, A. (2015). Kebijakan publik: Memahami konsep kebijakan publik (Absal. Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Amalia, L. R., Agustin, I. W., & Utomo, D. M. (2016). Evaluasi Kinerja Operasional Parkir di Badan Jl. KH Agus Salim, Jl. Zainul Arifin, dan Jl. SW Pranoto Kota Malang. *Planning for Urban Region and Environment Volume*, 5(3), 17-26.
- Abidin, M. Z. (2015). Dampak kebijakan impor beras dan ketahanan pangan dalam perspektif kesejahteraan sosial. *Sosio Informa*, 1(3).
- Alamsyahbana, M. I., Gizta, A. D., Novriana, P. D., Sarazwati, R. Y., Fauzar, S., Meisari, V., Tahir, I. B. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Arishanty, N. (2023). Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reunifikasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak Pada UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi). Ariyani, A., Mindarti, L. I., & Nuh, M. (2016). Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Pelayanan Kesehatan Melalui Program Gebrakan Suami Siaga di Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Gaghauna, V. G., Safar, M. M., & Wahab, A. (2022). Optimasi SIKS-NG di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(09), 1286-1293.
- Huraerah, A. (2022). Kebijakan perlindungan sosial: Teori dan aplikasi Dynamic Governance. Bandung. Nuansa Cendekia.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Penggunaan SIKS-NG*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2023) *User Guide SIKS-NG*. Jakarta: Kementrian Sosial RI.
- Maruapey, M. H. (2019). Urgensi Tata Kelola Inovasi Perekaman Data Dan Dokumen Kependudukan. *Jurnal Governansi*. Rahman, Tarigan. (2020). Menjelaskan Relasi Antara Kualitas Pelayanan Publik Dengan Korupsi Dan Keterlibatan Masyarakat Sipil Di Kota Malang. *Reformasi*, 11(1), 31-45.
- Sandu, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 3.
- Santoso, A., Kurniawati, E., & Dhani, A. U. (2023). Kajian Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 17(1), 79-94.
- Sari, I. F., & Sanjani, M. R. I. (2023). Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1080-1087.
- Semiawan, C. R. (2010).

- Metode penelitian kualitatif. Grasindo.
- Setiawan, A. (2022). Transformasi Digital dalam Pengelolaan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus SIKS-NG. *Jurnal Teknologi dan Informasi*, Sitepu, A., & Nainggolan, T. (2019). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. *Sosio Konsepsia*, 8(2), 184-199. Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). Pengantar Kebijakan Publik. *Humanities Genius*. Sugiyono. (2017) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta.
- Suwarno, Y. (2008). Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Peraturan Menteri sosial Nomor 5 tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir miskin
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial